**PENGARUH KEBIJAKAN PAJAK, PEMANFAATAN TEKNOLOGI, GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI PASAR GODEAN**

**Asri Wulandari**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

[asriwulandr6@gmail.com](mailto:asriwulandr6@gmail.com)

# INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan pajak, pemanfaatan teknologi, gaya kepemimpinan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Godean. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif, sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM di Pasar Godean. Sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin dengan jumlah 100 responden. Pengambilan sampel dengan menggunakan *Accidental Sampling.* Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis yang telah digunakan dengan menggunakan rumus analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa 1) Kebijakan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Godean. 2) Pemanfaatan Teknologi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Godean. 3) Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Godean. Implikasi pada penelitian ini adalah perlunya penyuluhan kepada para pelaku UMKM tentang pentingnya pajak, pemanfaatan teknologi dalam bidang perpajakan dan tentang gaya kepemimpinan, karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan paham tentang perpajakan.

**Kata kunci :** *Kebijakan Pajak, Pemanfaatan Teknologi, Gaya Kepemimpinan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*.

***THE EFFECT OF TAX POLICIES, TECHNOLOGY UTILIZATION, LEADERSHIP STYLES ON COMPLIANCE WITH TAXPAYERS OF MSME IN THE GODEAN MARKET***

**Asri Wulandari**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

[asriwulandr6@gmail.com](mailto:asriwulandr6@gmail.com)

# *ABSTRACT*

*The purpose of this study was to determine the effect of tax policy, technology utilization, leadership style on MSME taxpayer compliance in Godean Market. The research method used in this research is quantitative method, the source of the data used in this research is primary data and the population in this study is the taxpayers of SMEs in Godean Market. The sample is determined using the Slovin formula with a total of 100 respondents. Sampling using Accidental Sampling. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of hypothesis testing that have been used by using multiple linear regression analysis formulas show that 1) Tax policy has a positive effect on MSME taxpayer compliance in Godean Market. 2) The use of technology has a positive effect on the compliance of MSME taxpayers in the Godean Market. 3) Leadership Style has a positive effect on MSME taxpayer compliance in Godean Market.* *The implication of this research is the need for counseling to MSME actors about the importance of taxes, the use of technology in the field of taxation and about leadership styles, because there are still many people who do not understand and understand taxation.*

***Keywords:*** *Tax Policy, Utilization of Technology, Leadership Style, MSME Taxpayer Compliance.*

# 

# PENDAHULUAN

Penerimaan suatu negara ialah pendapatan yang diperoleh suatu negara untuk membiayai dan melaksanakan setiap program kerja yang telah disusun pemerintah. Sumber penerimaan negara antara lain berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan dari berbagai sumber penerimaan yang ada, penerimaan negara terbesar berasal dari sektor perpajakan.

Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam penerimaan negara, pajak bersumber dari rakyat yang memiliki kewajiban terutang kepada negara. Rakyat yang telah membayar kewajiban pajaknya tidak memperoleh imbalan secara langsung dari pemerintah karena dana yang diterima oleh pemerintah akan digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan pembangunan diberbagai sektor. Dalam hal ini, negara dituntut untuk memberikan yang terbaik agar masyarakat dan pelaku usaha dapat berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang layak diperhitungkan setiap negara. Manfaat dari adanya UMKM ini telah dirasakan oleh negara Indonesia sebagai bukti bahwa UMKM memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan perekonomian sebuah negara. Banyak pelaku UMKM yang tidak patuh adanya kesadaran kewajiban membayar pajak. Sedangkan perpajakan harus terus dipertahanankan bahkan ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal sesuai dengan angka yang telah ditargetkan sebelumnya.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak diantaranya kurangnya kesadaran akan memenuhi kewajiban sebagai seorang wajib pajak, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Selain itu terdapat beberapa faktor lainnya yang dapat dilihat dari penelitian terdahulu diantaranya adalah Kebijakan Pajak. Dimana faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian (Ponorîcă & Al-saedi, 2015) menyatakan bahwa kebijakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena dapat meminimalkan biaya. Sedangkan menurut Rifki Alfiana Rosi (2018) mengatakan bahwa kebijakan wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terjadi karena kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak UMKM merupakan ketentuan yang wajib dan sangat diperlukan.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diantaranya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Teknologi merupakan keseluruhan sarana penyediaan barang. Pemanfaatan Teknologi dibidang bisnis saat ini sangat diperlukan karena memberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas dan mempercepat waktu termasuk didalamnya kemudahan pembayaran pajak. Tidak hanya pada usaha-usaha besar ataupun perusahaan-perusahaan yang berkembang pesat, namun kepatuhan pajak pada UMKM sekarang diperlukan untuk menaikkan jumlah target omset, mencari informasi pada pesaing dan sebagainya. Menurut Tahar dan Sandy (2017) menjelaskan bahwa pengetahuan teknologi informasi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan menurut Mardi dan Ardiati (2017) teknologi informasi menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hal tersebut terjadi karena faktor minimnya pengalaman terdahulu, kemampuan dan pengetahuan seseorang. Hal ini terjadi karena teknologi sekarang ini sudah berkembang dan UMKM *go digital* sudah banyak diterapkan.

Dalam usaha bisnis UMKM ditunjukkan juga bahwa kepemimpinan sangat diperlukan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini juga dapat menyebabkan motivasi kerja seseorang berkurang. Gaya kepemimpinan yang tepat juga termasuk dalam faktor penting dalam memotivasi pelaku usaha. Berdasarkan hasil penelitian Darmayasa (2016) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM tidak hanya dilihat dari gaya kepemimpinan semata, namun memerlukan tahapan-tahapan yang harus dilalui pemimpin untuk mengarahkan pelaku usaha dapat bekerja sesuai harapan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan (Siringoringo, 2017) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. Gaya kepemimpinan dalam kepatuhan pajak UMKM lebih cenderung menggunakan gaya kepemimpinan transformasional dikarenakan gaya kepemimpinan ini lebih memotivasi para karyawanya dan tidak hanya fokus akan dirinya sendiri.

Penelitian yang peneliti saat ini lakukan yaitu di Pasar Godean, Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta karena kepatuhan wajib pajak UMKM di daerah tersebut masih rendah belum melampaui target yang telah di perhitungkan. Berikut ini data yang mendukung bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Godean :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Retribusi Daerah Godean Tahun 2015-2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target Pajak Retribusi** | **Realisasi** | **%** |
| 2015 | 9.000.000 | 25.119.287 | 279.10 |
| 2016 | 10.000.000 | 12.371.184 | 123.71 |
| 2017 | 12.000.000 | 4.470.040 | 37.25 |
| 2018 | 2.500.000 | 5.403.000 | 216.12 |
| 2019 | 5.000.000 | 1.148.400 | 22,97 |

*(Sumber data : Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman)*

Dari data tersebut menunjukan bahwa jika dilihat dari penerimaan Pajak Retribusi Daerah Godean ditahun terakhir masih diangka 22,97 Persen, hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM juga tergolong rendah. Alasannya karena keterbatasan sumber pendanaan mengalami penurunan baik dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer akibat kondisi pandemi *covid 19.*

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kebijakan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Godean?
2. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Godean?
3. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Godean?

## LANDASAN TEORI

### Teori Atribusi

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang yang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi adalah menjelaskan sebab dari berbagai perilaku yang menimpa seseorang (Darwati, 2015).

### *Theory of Planned Behaviour*

*Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa munculnya perilaku seorang individu dapat ditimbulkan karena adanya niat untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Theory of planned behavior adalah teori hasil penyempurnaan dari reason action theory dan dikembangkan oleh Ajzen. Teori planned behaviour beranggapan bahwa faktor-faktor motivasi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dapat dilihat dengan intensi. *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Dalam TRA dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norms* (Fishbein dan Ajzen, 1975), sedangkan dalam TPB ditambahkan satu faktor lagi yaitu *perceived behavioral control* (Ajzen, 1991).

### *Technology Acceptance Model* (TAM)

Salah satu teori yang merumuskan pengaruh penggunaan sistem informasi dan biasanya digunakan untuk menjelaskan penerimaan yang dilakukan oleh individu untuk menggunakan sistem informasi disebut metode penerimaan teknologi informasi atau biasa disebut *Technology Acceptance Model* (TAM). *Theory of Reasoned Action* menjelaskan adanya reaksi dan persepsi pengguna atau pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) yang pada akhirnya akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut.

### Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Teori ini berkeyakinan bahwa tidak ada individu yang bersedia membayar pajak sukarela. Teori Sandmo dalam Dudy (2016) mengamsusikan bahwa tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi, perilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan memaksimalkan kegunaan yang diharapkan. Di dalam perpajakan, kepatuhan berkaitan dengan keharusan membayar pajak. Kepatuhan terhadap pajak dapat diasumsikan bahwa wajib pajak diharuskan mematuhi peraturan perpajakan, sedangkan peraturan perpajakan merupakan salah satu indikator dalam kebijakan pajak. Sehingga dalam penelitian ini, Teori Kepatuhan relevan untuk menjelaskan kebijakan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### Definisi Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2017) Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### Kebijakan Perpajakan

Menurut Kamus Indonesia, kebijakan perpajakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Menurut Ray M. Sommerfeld yang dikutip R. Mansury pengertian kebijakan perpajakan adalah pengalihan sumber daya sektor swasta kepada sektor publik (Negara), karena penduduk yang bersangkutan mempunyai kemampuan secara ekonomis yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan tanpa mendapatkan imbalan yang langsung ditunjuk dalam rangka memenuhi tujuan ekonomi sosial negaranya. Tujuan kebijakan perpajakan adalah sama dengan kebijakan publik yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, distribusi penghasilan yang lebih adil dan stabilitas.

### Pemanfaatan Teknologi

Menurut Roger dalam Rusman (2015) teknologi adalah suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidak pastian dalam hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan.

Manfaat penggunaan teknologi informasi antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan
2. Memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan
3. Pengembangan otomatis perpustakaan

### Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara yang dimiliki seorang pimpinan yang menunjukkan suatu sikap yang menjadi ciri khas tertentu untuk mempengaruhi pegawainya dalam mencapai tujuan organisasi (Mulyadi, 2015). Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi pegawainya agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula di katakan pola perilaku dan strategi yang diterapkan oleh seorang pemimpin (Zainal et al, 2017).

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak sangat diperlukan dari tiap-tiap orang yang mempunyai kewajiban untuk membayarkan pajaknya. Menurut Tiraada (2013), Kepatuhan Pajak merupakan kepatuhan seseorang yang mana dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku.

### Wajib Pajak UMKM

**Wajib Pajak**

Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana Wajib Pajak adalah bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dalam Undang-undang KUP, Wajib Pajak adalah pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Diana Sari, 2013).

**Wajib Pajak Badan**

Menurut UU KUP Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutun, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

### Usaha Mikro Kecil Menengah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengertian usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

### Kriteria UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan) paling banyak Rp 50.000.000,00. Kriteria usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang yang memiliki hasil penjualan antara Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih antara Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00. Kriteria usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan dengan penjualan tahunan mencapai Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000 dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500.000.000,00.

### Peraturan Pemeritah Nomor 23 Tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak.PP ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru bagi UMKM sebesar 0,5 persen dari omset. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet)-nya diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun.

### PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Teori kepatuhan dan teori atribusi sangat relevan untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak Badan atau UMKM akan patuh membayar pajak dilihat dari faktor yang mempengaruhi seperti faktor kebijakan pajak. Jika kebijakan pajak baik, maka wajib pajak badan akan patuh terhadap peraturan perpajakan.

Penelitian yang mendukung Ponorica dan Al Saedi (2015) menyatakan bahwa kebijakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena dapat meminimalkan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa pembentukan kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kebijakan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah

**H1 : Kebijakan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

### Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Teori *Thecnology Acceptance Model* (TAM) merupakan teori yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi. Teori ini untuk menjelaskan tentang hubungan antara pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Wajib Pajak yang memiliki sikap bijaksana dalam memanfaatkan teknologi yang ada akan mendorong dalam pemenuhan memanfaatkan teknologi terhadap patuh wajib pajak badan.

Menurut Tahar dan Sandy (2017) menjelaskan bahwa pengetahuan teknologi informasi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM karena teknologi sekarang sudah banyak berkembang dalam bidang usaha termasuk UMKM dan sistem *go digital* sudah banyak diterapkan. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang diajukan peneliti adalah

**H2 : Pemanfaatan Teknologi berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

### Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Teori Perilaku tidak menekankan pada sifat-sifat atau kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin tetapi memusatkan pada bagaimana cara pemimpin berperilaku dalam mempengaruhi orang lain dengan gaya kepemimpinan masing-masing. Teori ini memandang bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku dan bukan dari sifat seorang pemimpin, sehingga teori ini menghubungkan antara gaya kepemimpinan seorang terhadap wajib pajak badan.

Menurut Darmayasa (2016) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM tidak hanya dilihat dari gaya kepemimpinan semata, namun memerlukan tahapan-tahapan yang harus dilalui pemimpin untuk mengarahkan pelaku usaha dapat bekerja sesuai harapan. Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah

**H3 : Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

# METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian Kuantitatif.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di Pasar Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampel Nonprobabilitas *(Nonprobability Sampling)* yaitu sampel tersedia (Accidental Sampling) atau disebut juga Teknik Konvenien *(convenience sampling).*

### Jenis Data dan Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017).

### Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuisioner (angket). Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017).

### Definisi Operasional Variabel Penelitian

#### Variabel Independen / Variabel Bebas

**Kebijakan Pajak**

Menurut Suandy (2011) kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan dari berbagai aspek kebijaksanaan pajak. Tujuan kebijakan perpajakan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pajak yaitu dengan penggunaan sumber daya yang terkumpul untuk pembentukkan barang model publik dan pengeluaran belanja negara lainnya yang berhubungan dengan pembangunan karena pajak berperan sebagai instrumen untuk mengatur perekonomian dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

**Pemanfaatan Teknologi**

Menurut Thampson *et al* (1991) dalam Irine Chintya (2015) pemanfaatan teknologi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan.

**Gaya Kepemimpinan**

Gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, tempramen, watak dan kepribadian yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain (Kartini Kartono, 2008).

#### Variabel Dependen / Variabel Terikat

**Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan memiliki arti suatu tindakan yang sesuai aturan serta berperilaku disiplin dengan mematuhi norma-norma yang berlaku. Hal ini sama dengan perlakuan pada perpajakan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika wajib pajak tersebut tidak melanggar dan menerapkan secara disiplin peraturan perpajakan yang berlaku (Mukzam, Sudjana, dan Pamuji 2014).

## Kerangka Pemikiran

Kebijakan Pajak

(X1)

H1 (+)

Pemanfaatan Teknologi

(X2)

(X1)

Kepatuhan Wajib Pajak

(Y)

H2 (+)

H3 (+)

Gaya Kepemimpinan

(X3)

(*Sumber : Data diolah, 2020)*

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### Karakteristik Responden

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, tabel dibawah ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 64 responden (64 %), dan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 36 responden ( 36 %).

Tabel 4.1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jenis Kelamin | Frekuensi | Persentase (%) |
| Laki-laki | 36 | 36 % |
| Perempuan | 64 | 64 % |
| Total | 100 | 100% |

*(Sumber: Data Primer Tahun 2020, diolah sendiri)*

1. Usia

Berdasarkan usia responden, tabel berikut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini terdapat dari berbagai usia. Mulai dari usia 21 tahun sampai dengan 65 tahun.

Tabel 4.2 Karakteristik Responden berdasarkan Usia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Usia | Frekuensi | Persentase (%) |
| 21-25 | 4 | 4 % |
| 26-45 | 48 | 48 % |
| 46-65 | 48 | 48% |
| Total | 100 | 100% |

*(Sumber: Data Primer Tahun 2020, diolah sendiri)*

1. Pendidikan terakhir

Berdasarkan tingkat pendidikan, tabel berikut menujukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar telah menempuh tingkat pendidikan SMA/K yaitu sebanyak 58 responden, tingkat pendidikan SD sebanyak 7 responden, tingkat pendidikan SMP sebanyak 22 responden, tingkat pendidikan Diploma sebanyak 4 responden, tingkat pendidikan S-1 sebanyak 5 responden, tingkat pendidikan lainnya sebanyak 4 responden.

Tabel 4.3 Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendidikan Terakhir | Frekuensi | Persentase (%) |
| SD | 7 | 7 % |
| SMP | 22 | 22 % |
| SMA/K | 58 | 58 % |
| Diploma | 4 | 4 % |
| S-1 | 5 | 5 % |
| Lainnya | 4 | 4 % |
| Total | 100 | 100 % |

*(Sumber: Data Primer Tahun 2020, diolah sendiri)*

## Analisis Data

#### Uji Validitas

Untuk menguji validitas kuesioner maka digunakan teknik korelasi product moment pearson. Dasar pengambilan keputusan adalah jika rhitung > rtabel pada tarif signifikan 0,05 maka item (butir soal) dinyatakan valid, Sebaliknya jika rhitung < rtabel maka butir soal dinyatakan tidak valid. Kriteria yang digunakan adalah bila nilai koefisien korelasi (rhitung) bernilai positif dan lebih besar dari rtabel, berarti item dinyatakan valid. Dengan n = 30 responden dan rhitung = 0,05 diperoleh nilai rtabel sebesar 0,296 (pengujian dua arah).

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Instrumen Penelitian | Koefisien Korelasi (Sig) | r hitung | r tabel | Keterangan |
| Kebijakan Pajak | Item 1 | 0,001 | 0,594 | 0,296 | Valid |
| Item 2 | 0,001 | 0,584 | 0,296 | Valid |
| Item 3 | 0,001 | 0,555 | 0,296 | Valid |
| Item 4 | 0,031 | 0,395 | 0,296 | Valid |
| Item 5 | 0,033 | 0,390 | 0,296 | Valid |
| Pemanfaatan Teknologi | Item 1 | 0,011 | 0,457 | 0,296 | Valid |
| Item 2 | 0,000 | 0,600 | 0,296 | Valid |
| Item 3 | 0,000 | 0,747 | 0,296 | Valid |
| Gaya Kepemimpinan | Item 1 | 0,001 | 0,594 | 0,296 | Valid |
| Item 2 | 0,001 | 0,584 | 0,296 | Valid |
| Kepatuhan Wajib Pajak | Item 1 | 0,314 | 0,190 | 0,296 | Tidak Valid |
| Item 2 | 0,003 | 0,524 | 0,296 | Valid |
| Item 3 | 0,011 | 0,457 | 0,296 | Valid |
| Item 4 | 0,038 | 0,380 | 0,296 | Valid |
| Item 5 | 0,005 | 0,502 | 0,296 | Valid |
|  | Item 6 | 0,016 | 0,435 | 0,296 | Valid |
|  | Item 7 | 0,011 | 0,459 | 0,296 | Valid |

*(Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 23.2020)*

Dari tabel tersebut, terdapat satu item yang dinyatakan tidak valid. Dimana koefisien korelasi nya adalah >0,05. Sehingga, satu item tersebut tidak dapat digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Karena itu, jumlah item yang digunakan dalam variabel kepatuhan wajib pajak yang dipakai 4 item. Sedangkan untuk variabel kebijakan pajak, variabel pemanfaatan teknologi, dan variabel gaya kepemimpinan dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai Corrected Item-Total Correlation> dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%). Sehingga dapat dipakai dalam kuesioner yang akan diberikan kepada responden.

#### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji kekonsistenan alat ukur dalam mengukur gejala/peristiwa yang sama. Dasar pengukurannya yaitu apabila kuisioner dikatakan reliabel jika dapat memberikan hasil relatif sama atau konsisten pada saat dilakukan pengukuran kembali pada objek yang berlainan pada waktu yang berbeda atau memberikan hasil yang tetap. Apabila koefisien *Cronbach Alpha* (ral) ≥ 0,6 maka dapat dikatakan instrumen tersebut reliabel.

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabel | *cronbach’s alpha* | Batas Reliabilitas | Keterangan |
| Kebijakan Pajak | 0,733 | 0,60 | Reliabel |
| Pemanfaatan Teknologi | 0,711 | 0,60 | Reliabel |
| Gaya Kepemimpinan | 0,827 | 0,60 | Reliabel |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 0,702 | 0,60 | Reliabel |

*(Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 23.2020)*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha dari seluruh variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel kebijakan pajak, pemanfaatan teknologi, gaya kepemimpinan dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

### Statistik Deskriptif

Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik Deskriptif

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descriptive Statistics** | | | | | |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Kebijakan Pajak | 100 | 12 | 25 | 19,14 | 2,243 |
| Pemanfaatan Teknologi | 100 | 7 | 15 | 11,67 | 1,608 |
| Gaya Kepemimpinan | 100 | 4 | 10 | 7,33 | 1,240 |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 100 | 15 | 29 | 22,75 | 2,649 |
| Valid N (listwise) | 100 |  |  |  |  |

*(Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 23.2020)*

Dari tabel 4.6 ditemukan hasil yang menunjukkan bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Untuk variabel kebijakan pajak nilai minimum yaitu sebesar 12 dari 5 item pernyataan, nilai maksimum yaitu sebesar 25 dari 5 item pernyataan, untuk mean ditemukan hasil 19,14 dan standar deviasi sebesar 2,243. Untuk rata-rata atau mean dan standar deviasi menunjukkan terdapat penyebaran data yang baik karena nilai untuk nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi. Dari keterangan tersebut mengasumsikan bahwa sebagian besar rata-rata sampel yang diteliti memiliki kebijakan pajak yang baik dalam hal kepatuhan pembayaran pajak.

Variabel pemanfaatan teknologi ditemukan nilai minimum yaitu sebesar 7 dari 3 item pernyataan, nilai maksimum yaitu sebesar 15 dari 3 item pernyataan, untuk mean ditemukan hasil 11,67 dan standar deviasi yaitu sebesar 1,608. Untuk rata-rata atau mean dan standar deviasi menunjukkan terdapat penyebaran data yang baik karena nilai untuk nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi. Dari keterangan tersebut mengasumsikan bahwa sebagian besar rata-rata sampel yang diteliti memiliki pemanfaatan teknologi yang baik dalam hal kepatuhan pembayaran pajak.

Variabel gaya kepemimpinan ditemukan nilai minimum yaitu sebesar 4 dari 2 item pernyataan, nilai maksimum yaitu sebesar 10 dari 2 item pernyataan, untuk mean ditemukan hasil 7,33 dan standar deviasi yaitu sebesar 1,240. Untuk rata-rata atau mean dan standar deviasi menunjukkan terdapat penyebaran data yang kurang baik karena nilai untuk nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasi. Dari keterangan tersebut mengasumsikan bahwa sebagian besar rata-rata sampel yang diteliti memiliki gaya kepemimpinan yang kurang baik dalam hal kepatuhan pembayaran pajak.

Variabel kepatuhan wajib pajak ditemukan nilai minimum yaitu sebesar 15 dari 6 item pernyataan, nilai maksimum yaitu sebesar 29 dari 6 item pernyataan, untuk mean ditemukan hasil 22,75 dan standar deviasi yaitu sebesar 2,649. Untuk rata-rata atau mean dan standar deviasi menunjukkan terdapat penyebaran data yang baik karena nilai untuk nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi. Dari keterangan tersebut mengasumsikan bahwa sebagian besar rata-rata sampel yang diteliti memiliki kepatuhan wajib pajak yang baik dalam hal kepatuhan pembayaran pajak.

### Uji Asumsi Klasik

#### Normalitas

Penelitian ini akan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Distribusi data dapat dikatan normal apabila signifikansi lebih besar dari 0,05.

Tabel 4.7 Uji Normalitas

| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  | Unstandardized Residual |
| N | | 100 |
| Normal Parametersa | Mean | .0000000 |
| Std. Deviation | 2.01945027 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .110 |
| Positive | .110 |
| Negative | -.108 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1.099 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .179 |
| a. Test distribution is Normal. | |  |
|  |  |  |

*(Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 23.2020)*

Berdasarkan tabel diatas uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikansi 0,179 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

#### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan atau korelasi antara dua variabel bebas atau lebih dalam model regresi linear berganda.

Tabel 4.8 Uji Multikolinieritas

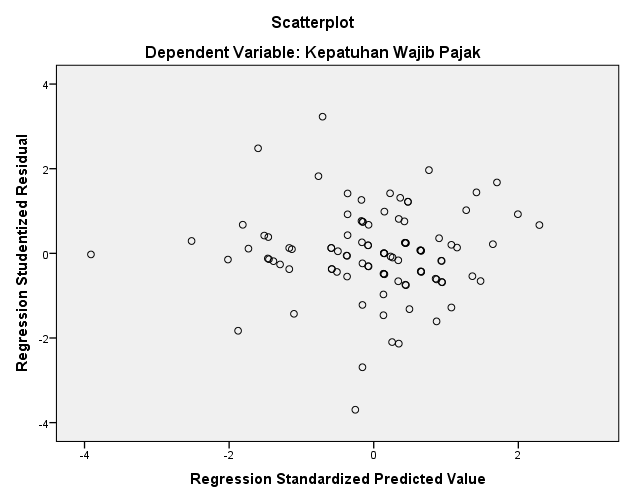
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 5,686 | 2,362 |  | 2,407 | ,018 |  |  |
| Kebijakan Pajak | ,364 | ,093 | ,308 | 3,920 | ,000 | ,981 | 1,019 |
| Pemanfaatan Teknologi | ,873 | ,133 | ,530 | 6,565 | ,000 | ,929 | 1,077 |
| Gaya Kepemimpinan | -,012 | ,171 | -,005 | -,068 | ,946 | ,946 | 1,057 |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak | | | | | | | | |

*(Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 23.2020)*

Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu jika VIF (*Variance Inflated Factors*) tidak lebih dari 10 dan jika *Tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolineritas. Dari tabel 4.8 diatas bisa dilihat bahwa nilai *tolerance* variabel independen Kebijakan Pajak sebesar 0,981, Pemanfaatan Teknologi sebesar 0,929, dan Gaya Kepemimpinan sebesar 0,946 tidak ada yang lebih kecil dari 0,10. Sedangkan dengan nilai VIF variabel independen Kebijakan Pajak sebesar 1,019, Pemanfaatan Teknologi sebesar 1,077, dan Gaya Kepemimpinan sebesar 1,057 tidak ada yang lebih besar dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

#### Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana varian dari kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua nilai variabel bebas, dimana uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau satu pengamatan lainnya. Untuk mendeteksinya dilihat dari titik-titik yang menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y pada grafik *Scatterplot*.



*(Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 23.2020)*

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 4.1 menujukkan bahwa sebaran data residual tidak membentuk pola tertentu dan menyebar di bawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y, dengan demikian terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

### Uji Hipotesis

#### Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini ada dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Dengan demikian, regresi linier berganda dinayatakan dala, persamaan matematika sebagai berikut:

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β1 = Koefisien regresi variabel Kebijakan Pajak

β2 = Koefisien regresi variabel Pemanfaatan Teknologi

β3 = Koefisien regresi variabel Gaya Kepemimpinan

X1 = Kebijakan Pajak

X2 = Pemanfaatan Teknologi

X3 = Gaya Kepemimpinan

Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan melakukan menggunakan program SPSS 23. Ringkasan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Uji Regresi Linier Berganda

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 5,699 | 2,360 |  | 2,415 | ,018 |
| Kebijakan Pajak | ,364 | ,093 | ,308 | 3,920 | ,000 |
| Pemanfaatan Teknologi | ,874 | ,133 | ,530 | 6,570 | ,000 |
| Gaya Kepemimpinan | -,014 | ,171 | -,007 | -,083 | ,934 |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak | | | | | | |

*(Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 23.2020)*

Dari tabel 4.7 diatas dapat dirumuskan regresi berganda sebagai berikut Y = 5,699 + 0,364 X1 + 0,874 X2 + (-0,014 X3)

Angka yang dihasilkan dari pengujian atau disajikan dalam persamaan regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 5,699 yang berarti bahwa jika variabel independen yaitu kebijakan pajak, pemanfaatan teknologi dan gaya kepemimpinan tidak ada atau bernilai nol, maka jumlah nilai kewajiban wajib pajak menjadi menurun 5,699.
2. Koefisien b1 X1, sebesar 0,364 hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan kebijakan pajak sebesar 1 satuan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,364.
3. Koefisien b2 X2, sebesar 0,874 hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan pemanfaatan teknologi sebesar 1 satuan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,874.
4. Koefisien b3 X3, sebesar -0,014 hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan gaya kepemimpinan sebesar 1 satuan akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar -0,014.

#### Uji t-Statistik (Uji Signifikansi Parsial)

Uji t statistik menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk melihat hasil uji t pada penelitian ini, maka disajikan hasil SPSS versi 23 dari uji t yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 4.10 Uji t-Statistik

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 5,699 | 2,360 |  | 2,415 | ,018 |
| Kebijakan Pajak | ,364 | ,093 | ,308 | 3,920 | ,000 |
| Pemanfaatan Teknologi | ,874 | ,133 | ,530 | 6,570 | ,000 |
| Gaya Kepemimpinan | -,014 | ,171 | -,007 | -,083 | ,934 |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak | | | | | | |

*(Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 23.2020)*

Digunakan Uji t dengan ketentuan t hitung > t tabel atau t statistik < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila t hitung < t tabel atau t statistik > 0,05, maka Ha ditolak dan H0 diterima, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengujian Uji t data dapat dilihat pada tabel 4.8.

1. Variabel Kebijakan Pajak (X1) memiliki nilai thitung sebesar 3,920 yang > dari ttabel 1,984 dengan nilai signifikansi 0.000 > 0,05 yang berarti H1 diterima atau secara parsial variabel kebijakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel Pemanfaaan Teknologi (X2) memiliki nilai thitung sebesar 6,570 yang > dari ttabel 1,984 dengan nilai signifikansi 0.000 > 0,05 yang berarti H2 diterima atau secara parsial variabel pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak.
3. Variabel Gaya Kepemimpinan (X3) memiliki nilai thitung sebesar -0,083 yang < dari ttabel 1,984 dengan nilai signifikansi 0,934 > 0,05 yang berarti H3 ditolak atau secara parsial variabel gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan uji hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa kebijakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Godean. Artinya semakin baik dan bijak perpajakan dalam melakukan pembayaran pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu oleh Ponorica dan Al Saedi (2015) menunjukkan bahwa kebijakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena dapat meminimalkan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa pembentukan kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kebijakan pajak. Lintje Kalangi (2017) mengatakan bahwa kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan. Ngadiman (2015) menunjukkan bahwa kebijakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

### Berdasarkan uji hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Godean. Artinya semakin baik tingkat pemanfaatan teknologi yang digunakan masyarakat untuk melakukan pembayaran perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu oleh peneliti Aryati dan Lidwina (2016) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan memanfaatkan teknologi di era ini maka akan sangat mempermudah bagi wajib pajak dalam melakukan kegiatan mengakses data. Tahar dan Sandy (2017) menjelaskan bahwa pengetahuan teknologi informasi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dijelaskan bahwa penggunaan teknologi tidak hanya pada usaha-usaha besar ataupun perusahaan-perusahaan yang berkembang pesat, namun pada UMKM sekarang diperlukan untuk menaikkan jumlah target omset, mencari informasi pada pesaing dan sebagainya. Puspita Rama Nopiana (2018) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan bagi wajib pajak. Artinya dengan menggunakan teknologi informasi maka tingkat kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dan peran teknologi informasi secara *online* dalam pajak sangat membantu dan bermanfaat.

### Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

### Berdasarkan uji hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Godean. Artinya tingkat gaya kepemimpinan yang digunakan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak masih rendah terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Siringoringo, 2017) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. Gaya kepemimpinan dalam kepatuhan pajak UMKM lebih cenderung menggunakan gaya kepemimpinan transformasional dikarenakan gaya kepemimpinan ini lebih memotivasi para karyawanya dan tidak hanya fokus akan dirinya sendiri. Dhaniel Hutagalung (2014) menyatakan bahwa pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak signifikan dan ditolak.

# KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Godean.
2. Pemanfaatan Teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Godean.
3. Gaya Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Godean.

## Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah disajikan, maka terdapat saran yang dapat diberikan pada peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada para pelaku UMKM tentang pentingnya membayar pajak untuk kepentingan Negara, agar para pelaku UMKM tidak menjadikan pajak itu suatu beban yang memberatkan bagi mereka sehingga akan meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM dalam membayar pajak.
2. Bagi para pelaku UMKM merupakan suatu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga diharapkan para UMKM melaporkan pajak penghasilan dengan sebenar-benarnya serta bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan setiap masing-masing usaha agar pemerintah dapat mempertimbangkan tarif serta tata cara yang sesuai dengan kemampuan para UMKM dan tidak memberatkan.
3. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya disarankan memperluas dan menambah variabel-variabel lain diluar variabel ini sehingga dapat memperoleh hasil yang variatif dan memperluas cakupan penelitian tentang persepsi wajib pajak dalam menjelaskan atau menggambarkan hal-hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## Implikasi

Implikasi pada penelitian ini adalah perlunya penyuluhan kepada para pelaku UMKM tentang pentingnya pajak, pemanfaatan teknologi dalam bidang perpajakan dan tentang gaya kepemimpinan, karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan paham tentang perpajakan.

## Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalan penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Saat kondisi pandemi ini peneliti sulit mendapatkan data secara detail di Pasar Godean, karena keterbatasan tempat dan waktu responden dan suasana yang ramai sehingga banyak pelaku UMKM yang sibuk sehingga ada yang tidak bersedia mengisi kuesioner yang diberikan oleh peneliti.
2. Penelitian ini masih menggunakan hardcopy karena target sampelnya untuk semua kalangan UMKM yang ada di Pasar Godean. Jika menggunakan softcopy maka peneliti akan sulit untuk mengirimkan kuesioner kepada setiap responden.
3. Dalam daftar penyataan kuesioner terdapat susunan kata yang kurang dipahami oleh responden sehingga sulit dalam menjawab butir penyataan yang diberikan oleh peneliti.
4. Peneliti tidak dapat mengetahui kejujuran dan kesungguhan responden dalam menjawab setiap butir pernyataan pada kuesioner yang diberikan.

# DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*,50,179-211.doi:10.1016/0749-5978(91)90020.

Chintya, Irine. 2015. “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Solok*”*. Solok: Universitas Negeri Padang.

Darmayasa, I. N. dan Yuyung R.A. 2016. *Catur Purusa Artha Lensa Dekonstruksi Definisi Pajak Yang Berkeadilan.* Simposisum Nasional Masyarakat Multiparadigma (MAMI) dan Pertemuan Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia Nasional (TEMAN) 4. Jakarta : 14-15 April 2016.

Diana, Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT.Refika Aditama.

Erly Suandy. 2013. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat : Jakarta.

Ghozali, I. (2016). “Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS 23 (Edisi Kelima)”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Mahdi, dan Windi Ardiati. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh*.* *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akutansi* Vol.3 No.1 Tahun 2017.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Penerbit Ardi.

Mulyadi, Deddy. (2015) *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan. Pertama.* Diedit oleh Deddy Supriyadi dan Muhammad Nur Affandi. Bandung: ALFABETA.

Pamuji, Adi ratno; Mochammad Djudi Mukzam dan Nengah Sudjana.2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Memenuhi Kewajiban perpajakan (Studi Pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Di KPP Pratama Malang Selatan). PS Perpajakan Universitas Brawijaya.

Ponorica, Andreea Gabriela and Ahmed H. Juhi Al-Saedi, 2015, *The Importance of Taxation Systems for SME Tax Compliance, Proceedings of The 9th International Management Conference,* *Management and Innovation for Competitive Advantage, Bucharest,* Rumania.

Rachmadi, Wahyu. 2014. “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak”. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ray, Sommerfeld, Anderson Herschel M,dan Brock Horace R. dalam M. Zain. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat

Robbins, Stephen P. 2001. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid 1, Edisi 8, Prenhallindo, Jakarta.

Rusman., Deni Kurniawan., Cepi Riyana. 2011. Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

Saraswati dan Baridwan, Zaki. 2013. Penerimaan Sistem E-Commerce: Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Manfaat dan Persepsi Risiko. JIMFEB. Volume 1. Nomor 2.

Sarwono, S.W & Meinarno, E.A. (2009) Psikologi Sosial. Jakarata: Salemba Humanika.

Siringoringo, Whereson. (2015). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Whistleblowing System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Resiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Akuntansi*, Vol. XIX, No. 2, 2015, Hal. 207-224.

Soemitro, Rochmat. dan M. Zain. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2011*. Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2017). Statistika untuk penelitian. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif

Tahar, Afrizal dan Sandy, Wilie. 2012. “pengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan kpp, sanksi perpajakan dan pengetahuan atas penghasilan kena pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*”. Jurnal akuntansi dan investasi* Volume 12 Nomor. 2, halaman: 185-196, Juli 2012.

Tryana A.M. Tiraada, 2013, Kesadaran Perpajakan, Sanksi pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis,* Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado.